

## SEMINAR NASIONAL KAMERA 2019

# KOMUNIKASI PEMILIH TERHADAP HASIL *QUICK COUNT* PADA PEMILIHAN PREDISEN PERIODE 2019 (Studi Kasus Pada Wilayah Pegambiran Ampalu, Padang)

Elva Ronaning Roem,<sup>1</sup>, Delvi Yerisca<sup>2</sup> Alfian Miko,<sup>3</sup>

Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas

Jl. Univeristas Andalas, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.

No. Telp./HP: <sup>1</sup>081374694942, <sup>2</sup>083182200995

E-mail: : <sup>1</sup>[elvarona80@gmail.com](mailto:elvarona80@gmail.com), <sup>2</sup>[delviyerisca@gmail.com](mailto:delviyerisca@gmail.com), : <sup>3</sup>[alfanmiko@hotmail.com](mailto:alfanmiko@hotmail.com)

**Abstract.** *The quick count results that were aired by television in Indonesia make people flare up and convey their opinions. This was the background of the results of the quick count which was not purely purified by the issuance of the results of the KPU's decision stating that Jokowi-Ma'aruf Amin's 01 received a vote of 55.41% while Prabowo-Sandi received 44.59% of the votes. This study aims to discover how audience give their reception about quick count results for 2019 Indonesia presidential election. Informants in this study are five residents from Kelurahan Pegambiran Ampalu, Kota Padang which part of DPT (the list of fixed voters), gave their vote in 2019 Election and watching television to quick count results in mass media. The theory for this study is reception theory by Stuart Hall. The results shows that four of five informants stand on oppositional position, and one of them stand on dominant-hegemonic position. The media that they consumed and their political view are the foundation of their reception towards quick count results for 2019 Indonesia presidential election.*

**Keywords:** *mass media, quick count, presidential election 2019, reception theory, Padang.*

**Abstrak.** Hasil *quick count* yang ditayangkan oleh televisi Nasional di Indonesia membuat masyarakat bergejolak dan menyampaikan berbagai macam opini mereka. Hal ini di latarbelakangi hasil *quick count* yang dipersepsi tidak murni dengan dikeluarkannya hasil keputusan KPU yang menyatakan bahwa pasangan urut 01 Jokowi-Ma'aruf Amin memperoleh suara 55,41 % sementara Prabowo-Sandi memperoleh suara 44,59%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan khalayak terhadap hasil *quick count* untuk pemilihan presiden 2019. Penelitian ini dilakukan pada lima orang informan yang merupakan warga dari Kelurahan Pegambiran Ampalu, Kota Padang yang terdaftar sebagai DPT, ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2019 dan aktif menonton tayangan hasil *quick count* di media massa. Dengan menggunakan Teori pemaknaan yang dikemukakan oleh Stuart Hall, Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima informan berada pada *oppositional position*, semntara satu lainnya berada pada *dominant-hegemonic position*. Media yang dikonsumsi informan serta pandangan politik mereka menjadi landasan pemaknaan mereka terhadap hasil *quick count* untuk pemilihan presiden 2019.

**Kata kunci:** media massa, hitung cepat, pemilihan presiden 2019, teori resepsi, Padang.

## BAB I

### Pendahuluan

Proses hitung cepat atau *quick count* menjadi salah satu hal yang hangat dibicarakan sepanjang Pemilu 2019 ini. Ada banyak tanggapan beragam masyarakat seputar *quick count*. Ada yang mempercayai hasil *quick count* dan ada juga yang tidak percaya. Sigi dari tiga lembaga survei SMRC, Indikator, dan Charta Politika menunjukkan kandidat nomor urut 2 itu menang telak di Sumbar dengan perolehan suara antara 83-87%. Selain Sumbar, Prabowo-Sandi juga disebut menguasai Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Namun hasil keputusan KPU pada tanggal 21 Mei 2019 ([pemilu2019.kpu.go.id](http://pemilu2019.kpu.go.id)), menyebutkan secara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin unggul dengan perolehan suara 55,41 % sementara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto –Sandi Uno hanya memperoleh 44,59% suara.

*Quick count* sebagai cara untuk memprediksi hasil pemilu secara cepat sudah dilakukan sejak tahun 1980-an di negara Eropa Timur dan Afrika. Metode ini hadir dikarenakan kebutuhan untuk mencegah kecurangan dalam penghitungan suara pemilu. Peluang kecurangan dapat diminimalisir dan diharapkan tidak mengubah yang seharusnya menang dan yang kalah. *Quick count* bertujuan untuk menjaga suara pemilih dan membantu agar proses pemilu berjalan dengan semestinya (Robi, 2012).

Penayangan *quick count* di Media Televisi Nasional di Indonesia pada pemilu tahun 2019 belakangan menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sejak ditayangkannya hasil *quick count* (17 April 2019) banyak persepsi yang dilontarkan masyarakat baik melalui media sosial maupun kepada pihak media sebagai penyebar informasi. Masyarakat sebagai audiens memiliki kekuatan untuk menciptakan makna secara bebas dan melakukan tindakan sesuai dengan makna yang mereka ciptakan berdasarkan pesan yang disampaikan oleh media. Pesan media tersedia secara luas dan terbuka sehingga bisa diinterpretasikan berbeda sesuai dengan budaya dan latar belakang seseorang.

Audiens yang aktif tidak hanya berhenti pada pemaknaan isi pesan media. Mereka juga memanfaatkan pesan tersebut secara sosial, termasuk mereproduksi pesan media dengan memberikan makna baru (Manuel Castells, 2007). Beberapa respon yang beragam mengenai hasil *quick count* pemilu 2019, dapat dilihat dari hasil *quick count* yang telah direproduksi menjadi berbagai hal seperti berita, postingan media sosial dan alat penggiring opini publik. Dari hal

tersebut bisa dilihat bahwa *quick count* yang ditayangkan telah dimaknai dengan sangat beragam oleh masyarakat.

Hal ini juga tidak terlepas dari fenomena yang terjadi terhadap dua calon presiden yakni Pasangan Jokowi Widodo Dan Ma'aruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiagho Pralahudhin Uno. Persaingan antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, berimbang kepada bagaimana masyarakat sebagai khalayak menanggapi hasil *quick count* dari berbagai badan survei. Perbedaan pandangan antara pasangan calon presiden terhadap hasil *quick count* menjadi salah satu faktor bagaimana masyarakat memaknai hal tersebut. Contohnya, untuk wilayah Kota Padang pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan 406.498 suara, atau 87.09% (Data KPU Sumbar 2019) dari seluruh suara sah. Dari jumlah suara tersebut bisa diprediksi bahwa masyarakat Kota Padang akan lebih mempercayai pasangan Prabowo-Sandi. Narasi kecurangan *quick count* yang dilontarkan Prabowo cenderung akan disetujui oleh mayoritas masyarakat Kota Padang.

Walaupun secara historis hasil *quick count* yang dirilis lembaga survei untuk pemilu di Indonesia tidak jauh berbeda dengan hasil KPU, perdebatan mengenai hasil *quick count* selalu ada di masyarakat. Namun perbedaan pandangan mengenai hasil *quick count* pada pemilu kali ini menciptakan rasa tidak percaya masyarakat terhadap lembaga-lembaga survei dan media yang menyajikannya. Banyak masyarakat yang curiga lembaga survei dan media berpihak kepada salah satu pihak sehingga informasi yang dihadirkan menjadi bias. Media massa sebagai wadah informasi untuk seluruh masyarakat sekarang dianggap sebagai pemenuhan kepentingan pihak tertentu.

Persepsi masyarakatpun di Kota Padang beragam dalam mengeluarkan opini mereka, ada yang menyampaikan setiap orang atau tim pemenangan mempunyai hak untuk percaya atau tidak dengan hasil *quick count*. Adapula yang berpendapat bahwa wajar ketika setiap paslon mempunyai *quick count* sendiri-sendiri. Ramainya masyarakat yang memberikan opini mereka tentang *quick count* karena masing-masing menganggap hasil *quick count*-nya yang benar, pihaknya yang menang. Bahkan adapula masyarakat pula yang berasumsi, meski mempunyai hasil *quick count* masing-masing, namun menurutnya setiap paslon tidak perlu mengeluarkan klaim kemenangan atau statement yang semakin membingungkan masyarakat. Sebab hal itu bisa memperkeruh keadaan.

## BAB II

## **Komunikasi Massa**

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas (Bungin, 2007: 71). Komunikasi massa hanya akan terjadi apabila pesan disampaikan melalui media massa.

Komunikator pada komunikasi massa berbeda dengan komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok. Bungin (2007) menjelaskan bahwa komunikator dalam komunikasi massa adalah pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi modern sehingga dalam menyebarkan informasi dapat dengan cepat ditangkap oleh publik. Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba berbagi informasi, pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan massa yang tersebar tanpa diketahui dengan jelas keberadaan mereka. Komunikator juga berperan sebagai pemberitaan yang mewakili instansi formal yang sifatnya mencari keuntungan dari penyebaran informasi itu.

Vivian (2008: 450) menyebutkan bahwa komunikasi massa sebagai proses penggunaan sebuah medium massa untuk mengirim pesan kepada audiens yang luas dengan tujuan untuk memberi informasi, menghibur atau membujuk. Adapun komponen komunikasi massa adalah sebagai berikut:

1. Pesan massa (*message*)
2. Media massa
3. Komunikasi massa itu sendiri
4. Audiens massa

### ***Quick Count* Pemilihan Presiden di Indonesia**

*Quick count* atau hitung cepat adalah sebuah metode verifikasi pemilihan umum menggunakan ilmu statistik yang dilakukan dengan menghitung presentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel. *Quick count* dilakukan dengan metodologi khusus sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. *Quick count* bukan penghitungan resmi, melainkan sebagai pembandingan agar tidak terjadi manipulasi penggelembungan suara.

*Quick count* untuk pemilu di Indonesia dilakukan pertama kali tahun 2004. Selain menjadi pemilu pertama dimana rakyat bisa memilih langsung presiden dan wakil presiden,

pemilu 2004 juga menjadi awal diperkenalkannya sistem prediksi perolehan suara melalui metode perhitungan cepat ini. Namun, LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial) yang bekerjasama dengan NDI (*The National Demographic Institute for International Affairs*) sebagai lembaga yang melakukan *quick count* kala itu dianggap KPU melanggar peraturan sebagai pemantau seperti yang diatur dalam undang-undang, Surat Keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemantau dan kode etik pemantau.

Pada pemilu berikutnya tahun 2009 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Denny JA dan Umar S Bakry dari AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia) terkait larangan pengumuman hasil survei pada masa tenang dan larangan pengumuman penghitungan cepat pada pemilu presiden (pilpres) pada saat hari pelaksanaan pilpres. Ketua KPU pun menilai pengumuman hasil survei pada hari tenang dan *quick count* saat hari pemilu tidak mengganggu (Wahid: 2009).

*Quick count* pemilu tahun 2019 menuai pro dan kontra yang cukup signifikan. Dalam *quick count* Pilpres 2019, Cyrus Network menyebut pasangan nomor urut satu, Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 55,7%, sedangkan pasangan nomor urut dua, Prabowo-Sandi Uno memperoleh suara sebanyak 44,3%. Hal ini menyebabkan pihak Prabowo-Sandi merasa tidak terima dan menuding lembaga survei memihak kepada pihak tertentu.

Tudingan yang dilontarkan pihak Prabowo-Sandi ditanggapi oleh pimpinan lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat dengan mengatakan bahwa dia siap untuk membuka data agar bisa diaudit dan mengharapkan pihak Prabowo sandi juga melakukan hal yang sama. Juru bicara BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi, Rahayu Saraswati menjawab tantangan dari lembaga survei dengan mengatakan bahwa data yang mereka miliki hanyalah untuk internal.

Konflik yang terjadi antara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan lembaga survei ini membuat pendapat publik menjadi terbagi. Pendukung Prabowo-Sandi menuduh bahwa hasil *quick count* yang ditayangkan di televisi maupun di media lainnya merupakan *hoax*. Perlawanan mereka didunia maya ditunjukkan dengan tagar #IniCurang. Dalam satu jam setelah hasil *quick count* dipublikasikan, tagar tersebut sudah dipakai lebih dari 5.600 kali dan menjadi salah satu *trending topic* di Indonesia.

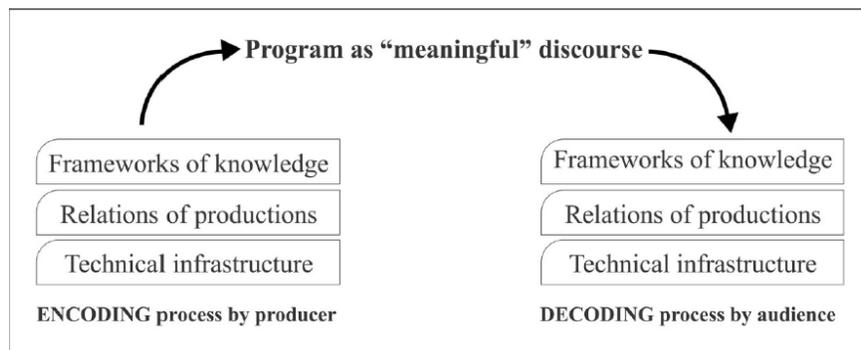
### **Teori Pemaknaan (*Reception Theory*)**

Teori pemaknaan (*reception theory*) dikemukakan oleh Stuart Hall pada tahun 1980

dengan menggunakan metode *encoding/decoding*. Model *encoding/decoding* tersebut sangat berpengaruh dalam mengkaji hubungan antara teks dan khalayak. Crouteu dan Hoyness (dalam Wardani, 2014: 23) menyebutkan *encoding/decoding* berfokus kepada hubungan antara pesan media sebagaimana itu dikonstruksikan atau ‘*encoded*’ oleh produsen media dan bagaimana pesan itu diinterpretasikan atau ‘*decoded*’ oleh khalayak.

Proses *encoding* berlangsung ketika teks/pesan media diproduksi oleh produsen. Sebelum sampai ke hadapan khalayak, produsen terlebih dulu merangkai teks dengan nilai-nilai tertentu sehingga menghasilkan wacana dengan tujuan tertentu, misalnya memengaruhi, menghibur, menginstruksikan atau membujuk khalayak untuk mengkonsumsinya. Sedangkan *decoding* merupakan proses pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak sesuai berdasarkan konteks, tujuan, ideologi, kepentingan bahkan media yang digunakan ketika mengkonsumsi pesan media.

Berikut ini adalah gambar mengenai bagaimana *encoding* dan *decoding* menurut Stuart Hall:



**Gambar 2.1.** Model *encoding/decoding* Stuart Hall  
(Sumber: Wardani, 2014)

Dalam metode Stuart Hall, *sender* mengantarkan pesan, namun pada saat penerima menerima pesan, maka pemaknaannya berbeda-beda. Pemaknaan yang berbeda-beda bisa terjadi karena gangguan yang terjadi ataupun beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi berbedanya pemaknaan seperti pendidikan, jenis kelamin, etnis, ketentuan yang berlaku, usia, pekerjaan, pengalaman, dan lain-lain (Hall, 1980).

Pesan yang dikirimkan akan menimbulkan berbagai macam efek kepada audiens. Hall (dalam Durham dan Keller, 2002: 174-176) mengidentifikasi tiga kategorisasi audiens yang telah mengalami proses *encode/decode* sebuah pesan:

1. *Dominant-hegemonic position*
2. *Negotiated position*

### 3. *Oppositional position*

#### **Paradigma Interpretif Konstruktivis**

Secara metodologi, teori pemaknaan (*reception theory*) termasuk dalam paradigma interpretifkonstruktivis, dimana menurut Neuman (2000: 71 (dalam Hadi: 2008)) paradigma interpretif konstruktivis dalam konteks penelitian sosial digunakan untuk melakukan intrepetasi dan memahami alasan-alasan dari para pelaku terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara dari pelaku untuk mengkonstruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka berikan kepada kehidupan tersebut.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis resepsi dengan pendekatan kualitatif. Analisis resepsi dipilih karena akan memberikan pandangan yang lebih jelas dalam proses interpretasi dan penggunaan media dalam konteks sehari-hari dimana khalayak mengartikan kembali dan menghasilkan makna dari teks yang mereka konsumsi.

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini ada adalah *quick count* pada pemilihan umum 2019. Kemudian subjek penelitian pada penelitian ini adalah informan yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini merupakan masyarakat Pegambiran Ampalu yang merupakan bagian dari DPT (Daftar Pemilih Tetap), berpartisipasi dalam Pemilu 2019, dan mengkonsumsi *quick count* di media massa.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan lima orang masyarakat untuk memnggali tanggapan mereka tentang *quick count* pada pemilu 2019. Untuk itu diperlukan panduan wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang kemudian akan berkembang saat wawancara berlangsung.

## **BAB IV**

### **Hasil dan Pembahasan**

Khalayak akan memberikan makna pada bagian *decoding*. Masyarakat yang menjadi

informan pada penelitian ini memberikan makna atas *quick count* pemilu 2019 sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Perbedaan dari kelima informan adalah usia, pekerjaan, media yang dikonsumsi dan pandangan politik.

### **1. Makna Yang Timbul Atas *Quick Count* Pemilihan Presiden Pada Pemilu 2019.**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa makna yang timbul atas *quick count* pemilihan presiden pada Pemilu 2019. Nella (23 tahun) yang berprofesi sebagai pengajar disalah satu sekolah memilih Metro TV dan Global TV sebagai media untuk mendapatkan informasi tentang hasil *quick count*. Saat ditanya soal media lain selain televisi, Nella mengatakan dia mendapatkan informasi soal kelangsungan hasil pemilihan presiden melalui media sosial khususnya *instagram* dan *broadcast message* dari grup *whatsapp*.

Mengenai hasil *quick count* yang ditayangkan ditelevisi Nella mengaku tidak mempercayai hasil tersebut. Nella beranggapan bahwa media saat ini sudah tidak netral sehingga apa yang diberitakan kepada masyarakat belum tentu benar. Nella merasa hasil tersebut sudah dipengaruhi kepentingan media. Baik dari pihak lembaga survei maupun media sebagai yang menyajikan memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, menurut Nella hasil *quick count* harus tetap ditayangkan karena masyarakat pastinya menginginkan hasil secepatnya untuk mengetahui calon pemimpin mereka. Hanya saja untuk periode kali ini Nella tidak mempercayai hasil *quick count* karena sangat bertolak belakang dengan informasi yang didapatnya di *instagram* dan *broadcast message* dari grup *whatsapp*. Dengan penjelasan diatas bisa dilihat bahwa Nella berada pada *oppositional position* terhadap hasil *quick count*.

### **2. Pandangan Politik Berperan Terhadap Pemaknaan Khalayak Terhadap Hasil *Quick Count* Pemilihan Presiden**

Informan selanjutnya, Santi (42 tahun) yang bekerja sebagai penjahit sekaligus ketua RT beranggapan bahwa hasil *quick count* adalah sebuah kebohongan. Sebagai pendukung salah satu partai politik, Santi merasa bahwa hasil pemilihan presiden kali ini sudah melalui campur tangan pemerintah. Hasil *quick count* yang ditayangkan hanya untuk membuat masyarakat mempercayai bahwa calon yang unggul adalah pemenang sehingga kebenarannya tidak akan terungkap. Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang hasil pemilihan presiden, Santi memilih media televisi

TV One, kiriman dan postingan *facebook*, dan *broadcast message* dari grup *whatsapp*. Santi biasanya membandingkan apa yang dilihat di televisi dengan informasi yang didapatnya dari *facebook* maupun *broadcast message* dari grup *whatsapp*. Dengan melihat penjelasan Santi ini, maka Santi berada pada *oppositional position*.

Informan lainnya adalah seorang pemilih pemula yang baru pertama kali mendapatkan hak suara dalam pemilu. Tasya (18 tahun) adalah seorang siswa kelas tiga SMA di sebuah SMA Negeri Kota Padang. Sebagai pemilih pemula, saat melihat hasil *quick count* yang ditayangkan di televisi Tasya tidak pernah mempermasalahkan hasil tersebut. Sejauh ini Tasya merasa hasil *quick count* bukanlah hal yang perlu diributkan karena pada akhirnya hasil dari KPU adalah yang paling penting. Apalagi *quick count* pastinya sudah melalui proses yang seharusnya. Tasya juga tidak pernah secara sengaja mencari informasi soal hasil *quick count* di media lain karena baginya lebih baik menunggu hasil akhir dari KPU. Saat ditanya apakah *quick count* dibutuhkan Tasya menjawab iya, karena kebanyakan masyarakat pasti menginginkan gambaran hasil yang cepat. Dalam kategori audiens yang telah mengalami proses *encoding* dan *decoding* maka Tasya berada pada posisi *dominant-hegemonic position* dimana dia menerima pesan media sesuai dengan yang dikirimkan oleh pembuat pesan.

Mega (32 tahun) seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha *online* yang juga merupakan informan dalam penelitian, menyatakan sebagai pengkonsumsi media berita televisi, dirinya selalu memilih Metro TV dan TV One sebagai media untuk mendapat informasi tentang hasil pemilihan presiden 2019. Namun Mega sebagai masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya dalam perihal memilih Presiden menegaskan, mengenai hasil *quick count* Mega merasa hal tersebut tidak benar benar murni. Pemerintah mempunyai peran tertentu terhadap hasil *quick count* yang ditayangkan kepada masyarakat. Mega merasa agak sulit untuk mempercayai apa yang ditayangkan karena media saat ini menunjukkan dengan jelas keberpihakan mereka.

Menurut Mega, *quick count* memang adalah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat, namun untuk pemilihan presiden kali ini tidak bisa dipercaya begitu saja. Saat ditanya mengenai media lain yang digunakan Mega untuk mendapatkan informasi soal pemilihan presiden, Mega mengatakan bahwa media sosial *facebook* menjadi media lain yang dikonsumsinya. Mega mengaku bahwa dia lebih mempercayai informasi dari *facebook* daripada yang ditayangkan di televisi. Mega juga merasa bahwa kebanyakan orang-orang disekitarnya tidak mempercayai hasil

*quick count*. Mereka dengan jelas menolak hasil *quick count*. Dalam kategorisasi audiens yang dijelaskan oleh Hall terkait teori pemaknaan maka Mega berada pada *oppositional position*.

Selanjutnya adalah Lily (31 tahun) yang berprofesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit Kota Padang. Sebagai seseorang yang memiliki kesibukan cukup banyak, Lily mengungkapkan bahwa dia mendapatkan informasi soal hasil pemilihan presiden dari televisi secara random. Maksudnya Lily tidak pernah menetapkan channel tertentu untuk dikonsumsinya. Selain tayangan televisi, *broadcast message* dari grup *whatsapp* menjadi media lain bagi Lily untuk mendapatkan informasi.

Sejauh ini Lily mengatakan dia memang tidak mempercayai hasil *quick count*. Selain karena pilihan politik hal tersebut juga dikarenakan banyaknya informasi yang diterima yang sangat bertolak belakang dengan yang ditampilkan di televisi. Orang-orang sekitar Lily juga merasa bahwa hasil *quick count* adalah sebuah kebohongan yang menyebabkan Lily juga berpendapat demikian. Soal kepentingan perlunya tayangan *quick count* Lily merasa perlu, namun sangat berharap untuk kedepannya bisa lebih netral tanpa bersangkutan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kategori audiens menempatkan Lily pada *oppositional position* karena Lily sudah menerima pesan yang disampaikan namun tidak setuju dengan nilai dominan yang diekspresikan oleh pesan media tersebut.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan khalayak terhadap *quick count* pemilihan presiden 2019 terbagi kepada dua kategori. Kategori pertama adalah kategori yang paling dominan yaitu, *oppositional position* dimana khalayak menolak hasil *quick count* pemilihan presiden 2019 yang ditayangkan. Empat dari lima informan berada pada posisi ini. Sementara satu lainnya berada pada *dominant-hegemonic position* dimana dia menerima pesan yang disampaikan media yaitu berupa hasil *quick count* untuk pemilihan presiden 2019.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media yang dikonsumsi, dan pandangan politik mempengaruhi pemaknaan khalayak mengenai *quick count* pemilihan presiden 2019. Pemaknaan pesan media dipengaruhi media lain yang digunakan informan untuk mendapatkan informasi. *Broadcast message* dari grup *whatsapp* menjadi media yang dipilih tiga orang informan sebagai media pembanding dan menjadi landasan pemaknaan mereka terhadap *quick*

*count* pemilihan presiden. Selain itu media sosial seperti *facebook* dan *instagram* juga mejadi media lain yang digunakan informan terkait informasi mengenai pemilihan presiden 2019.

Pandangan politik juga berperan terhadap pemaknaan khalayak terhadap hasil *quick count* pemilihan presiden. Informan yang menjadi pendukung partai politik tertentu memiliki pandangan yang berbeda dengan informan yang merupakan pemilih pemula dan tidak memiliki pengalaman tentang politik.

Secara keseluruhan informan menyetujui bahwa penanyangan *quick count* merupakan hal yang diperlukan masyarakat. Hanya saja kepercayaan khalayak terhadap hasil *quick count* untuk pemilihan presiden periode 2019-2024 bisa dibilang rendah. Mereka berharap baik media maupun lembaga survei untuk tidak berpihak pada salah satu pihak.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Bungin, B. 2007. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Castells, M. 2007. *Communication, Power and Counter-power in the Network Society*. International Journal of Communication.
- Durham, Gigi, M, & Keller, DM. 2006. *Media and Cultural Studies Keywork*. United Kingdom: Black Well Publishing.
- Hadi, IP. 2008. 'Penelitian Khalayak Dalam Perspektif Reception Analysis'.
- Hall, S. 1980. *Encoding/Decoding. Centre for Contemporary Cultural Studies (Ed.): Culture, Media, Language*. New York: Pantheon Books.
- Kurniawan, RC. 2012. 'Quick Count (Metode Hitung Cepat) Dalam Perspektif Pemilukada'. Universitas Lampung.
- Vivian, J. 2008. *Teori Komunikasi Massa*. Ed. Ke-8. Jakarta: Kencana.
- Wardani, Dita Kesuma. 2014. 'Resepsi Pembaca Terhadap Teks Homoerotika dalam Slash Fanfiction'. Universitas Gajah Mada.

### Jurnal:

- Wahid, Abdul. 2009. 'Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohongan Publik'. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6, no. 3, hh. 1-17.

### Internet:

<https://infopemilu.kpu.go.id/>